



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO. : 263 / L. 19 / L1 / 1. 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh Yayasan Sosial "MAULANA" Pengayaman Sukasada Kecamatan Sukasada dengan surat Tanggal 8 Juni 1990 nomor : 09/K.YM/VI/1990 dan setelah memperhatikan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud kabupaten BULELENG maka berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 nomor : 018 / C / Kep / 183, dengan ini memberikan ijin oprasional kepada :

TAMAN KANAK KANAK MAULANA

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

MENGESAHKAN

20 copy sesuai dengan aslinya

KABUPATEN BULELENG

KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

PEMUDA DAN OLARAGA

Denpasar, 11 November 1991

A N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Bali

I. Nengah Merttha

NIP. : 130163066



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039124.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAULANA PEGAYAMAN**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAULANA PEGAYAMAN tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016100651100566 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAULANA PEGAYAMAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAULANA PEGAYAMAN
berkedudukan di KABUPATEN BULELENG sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris AUNURROFIQ, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042194.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 Oktober 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039124.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAULANA PEGAYAMAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KETUT BANY BARMAWI, SE	3313102912810003
PANJI ISLAM	5108051011680005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KETUT EKA KANATAM	5102066606730004	PEMBINA	ANGGOTA
PANJI ISLAM	5108051011680005	PEMBINA	ANGGOTA
SOFIA CAKTI	3674035212770022	PEMBINA	ANGGOTA
KETUT BANY BARMAWI, SE	3313102912810003	PENGURUS	KETUA
RAUM DHOMIRI	3108050901870003	PENGURUS	SEKRETARIS
KETUT EKA KANATAM	5102066606730004	PENGURUS	BENDAHARA
WAYAN TAMAM IMAM, S.PD	3311083005660002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042194.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 06 Oktober 2016